PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SRAGEN
ASKARA BUMI SUKOWATI
NYAWIJI MELAYANI BUMI SUKOWATI

RENCANA AKSI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2025



DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

RENCANA AKSI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPMPTSP)

KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025

Penyusunan Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025. Tujuan dan sasaran yang akan di capai hasil dengan target yang telah direncanakan.

Demikian Laporan Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Sragen, 20 Januari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMAN JUDUL	.....	ii
KATA PENGANTAR	.....	iii
DAFTAR ISI	.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	.....	1
A. LATAR BELAKANG	.....	1
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	.....	2
C. SUMBER DAYA MANUSIA	.....	6
D. MAKSUD DAN TUJUAN	.....	7
E. LANDASAN HUKUM	.....	7
BAB II. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA	.....	8
A. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	.....	8
B. RENCANA AKSI TAHUN 2025	.....	13
C. JADWAL MONITORING DAN EVALUASI	.....	20
BAB III. PENUTUP	.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah dokumen rencana untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat, sehingga kualitas penyusunan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Aksi Tahunan, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;

3. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen RKPD dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra dan RKPD. Rencana Aksi merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, dasar penyusunan RKA-DPA dan RAPBD.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok
   a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
   b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
   c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
   d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Fungsi

   Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:

a. Kepala Dinas;

Kepala DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

b. Sekretariat, membawahi:

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretariat mempunyai fungsi ;

1) Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4) Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5) Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya;

c. Kelompok Substansi **Penanaman Modal**, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Substansi Penanaman Modal mempunyai fungsi;

1) Penyusunan bahan program kerja di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kelompok Substansi **Pelayanan Terpadu Satu Pintu**, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

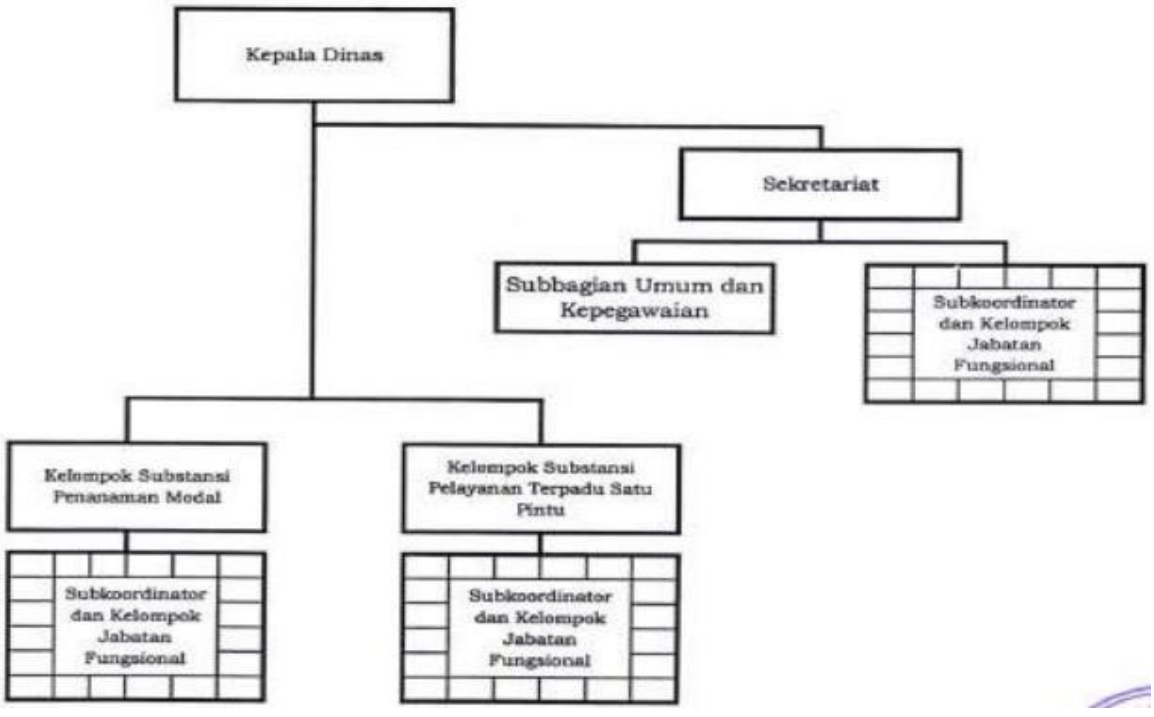
Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi ;

1) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi Penyediaan

Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah, Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;

6) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



C. SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL 1.1
JUMLAH ASN BERDASAR GOLONGAN

Golongan / Ruang	Esselon			JF	Staf	Jumlah
	II	III	IV			
Golongan IV/c						
Golongan IV/b	1	1				
Golongan IV/a			1	1		
Jumlah Golongan IV	1	1	1	1	0	4
Golongan III/d				10	2	
Golongan III/c				0	1	
Golongan III/b					2	
Golongan III/a					1	
Jumlah Golongan III	0	0	0	10	6	16
Golongan II/d						
Golongan II/c				1		
Golongan II/b						
Golongan II/a						
Jumlah Golongan II	0	0	0	1		1
Golongan I/d						
Golongan I/c						
Golongan I/b						
Golongan I/a						
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0
PPPK					1	
Jumlah PPPK					1	1
Total	1	1	1	12	7	22

Sumber Data : DPMPTSP Tahun 2024

TABEL 1.2

JUMLAH ASN BERDASAR PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	DOKTOR (S3)	-
2	PASCASARJANA (S2)	5
3	SARJANA (S1)	14
4	SARJANA MUDA (D3)	3
5	SLTA / SMEA / MA	0
6	SLTP	0
7	SD	0
JUMLAH		22

Sumber data : DPMPTSP Tahun 2024

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Rencana Aksi Tahun 2025 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.
2. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana aksi ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

E. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan ;
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

BAB II

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

A. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja terhadap target kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen, berdasarkan tujuan/ sasaran strategis jangka menengah serta Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagai berikut:

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)	TARGET					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5					6
1.	TUJUAN : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase peningkatan realisasi investasi	• **Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan realisasi investasi. • **Formulasi Pengukuran:** Nilai investasi tahun n dibandingkan dengan realisasi investasi tahun n-1. • **Tipe Perhitungan:** Non Kumulatif • **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	2,93	3,81	4,26	4,26	4,27	4,27
1.1	SASARAN : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor)	• **Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan iklim usaha yang berdaya saing dan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha, yang mendukung peningkatan jumlah PMA/ PMDN (investor). • **Formulasi Pengukuran:** Jumlah PMA/ PMDN berdasarkan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam tahun berjalan. • **Tipe Perhitungan:** Komulatif • **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1.250	1.313	3.000	10.998	11.000	27.561
1.2	SASARAN : Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase peningkatan IKM bidang perizinan dan nonperizinan	• **Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan (%). • **Formulasi Pengukuran:** IKM tahun n dibandingkan IKM tahun n-1 dikalikan 100% • **Tipe Perhitungan:** Non Komulatif • **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan nonperizinan	0,29	0,86	3,14	3,14	3,14	3,14

Dari indikator kinerja utama tersebut diperjanjikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dengan Bupati Sragen sebagai pemberi mandat dalam bentuk Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase peningkatan realisasi investasi	4,26	persen
1.1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	10.998	investor
1.2	**Sasaran Strategis:** [-] Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase peningkatan IKM bidang perizinan dan nonperizinan	3,14%	persen
1.3	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (76,16)	predikat

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	5.949.254.177	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000.000	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	137.534.000	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	482.359.500	DAU
5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	32.000.000	DAU
6	Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	55.000.000	DAU
	Jumlah	6.756.147.677	

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada rencana kinerja tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Sragen, maka terdapat 5 (lima) Program yang mendukung sasaran strategis/ IKU dan 1 (satu) Program yang mendukung sasaran penunjang/ kinerja penunjang.

1. **Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung IKU antara lain:**

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**50%**	
18.02.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]**	**1**	
18.02.02.01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	1	
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**25 %**	
18.03.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**jumlah even promosi [kali]**	**2**	
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	2	
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**84,00**	
18.04.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**100%**	
18.04.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	150	
18.04.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	3.200	
18.04.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [Orang]	80	
18.04.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [Kegiatan Usaha]	500	
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**10%**	

1	2	3	4	5
18.05.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**100%**	
18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal [pelaku usaha]	60	
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**50%**	
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	50%	
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	1	

2. **Program yang mendukung kinerja penunjang**:

Kode				**Program/ Kegiatan/ Subkegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Keterangan**
1				2	3	4	5
18	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	100	
18	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (dokumen)**	**3**	
18	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3	
18	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	1	
18	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	12	
18	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN [Orang/bulan]	25	
18	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [dokumen]	2	

1				2	3	4	5
18	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	
18	01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	30	
18	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**12**	
18	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	4	
18	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	8	
18	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	4	
18	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	4	
18	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	1	
18	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	25	
18	01	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [dokumen]	1	
18	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah**	**2**	
18	01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (Unit)	1	
18	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	4	
18	01	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]	28	
18	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12	
18	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	4	

1				2	3	4	5
18	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	4	
18	01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	4	
18	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	4	
18	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**2**	
18	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	15	
18	01	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	96	
18	01	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	1	
18	01	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	1	
18	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	28	

B. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Secara rinci Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

RENCANA AKSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS /PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				TOTAL	PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase peningkatan realisasi investasi	Membandingkan realisasi investasi tahun n dengan tahun n-1 (n-(n-1)/n-1)*100%	persen	4,26	6.756.147.677	1,0	2,00	3,00	4,26	4,26	Kepala DPMPTSP
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	Jumlah PMA/ PMDN berdasarkan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam tahun n	investor	10.998	6.756.147.677	2.500	5.000	7.500	10.998	10.998	Kepala DPMPTSP
1.2	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase peningkatan IKM bidang perizinan dan nonperizinan	Membandingkan IKM tahun n IKM tahun n-1 (n-(n-1)/n-1)*100%	poin	3,14	6.756.147.677	1,00	1,00	2,00	3,14	3,14	Kepala DPMPTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**(Jumlah dokumen yang disusun/ umlah dokumen yang seharusnya disediakan) x 100%**	**%**	**50**	**100.000.000**	**0**	**10**	**20**	**30**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	Jumlah dokumen kebijakan penanaman Modal yang disusun tahun n	**dokumen**	**1**	**100.000.000**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**Koordinator PM**
2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun n	dokumen	1	100.000.000	1	1	1	1	1	Ketua Tim Kerja Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**(Jumlah realisasi investasi dari pelaku usaha skala menengah besar/ kepeminatan usaha skala menengah besar)x100%**	**%**	**25**	**137.534.000**	5	10	15	25	25	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang**	**jumlah even promosi [kali]**	**Jumlah event promosi**	**kali**	**2**	**137.534.000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**2**	**Koordinator PM**

	menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**penanaman modal (even) tahun n**									
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota tahun n	Dokumen	2	137.534.000	0	0	1	2	2	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	IKM tahun n	**point**	**84**	**392.359.500**	**84**	**84**	**84**	**84**	**84**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Jumlah layanan perijinan dan non perijinan yang dilengkapi dengan standart pelayanan tahun n**	**persen**	**100**	**392.359.500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah tahun n	kegiatan usaha	150	90.000.000	0	50	100	150	150	Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	pelaku usaha	3.200	119.992.000	400	800	1.200	3.200	3.200	Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik tahun n	orang	80	45.000.000	20	40	60	80	80	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Jumlah Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha tahun n	kegiatan usaha	500	227.367.500	25	50	50	25	150	Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	(jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM/ jumlah pelaku usaha terdaftar) x 100%	**persen**	**10**	**32.000.000**	**2**	**2**	**3**	**3**	**10**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	**32.000.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Koordinator PM**
2.18.05.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan)x100%	kegiatan usaha	60	32.000.000	15	30	45	15	**60**	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**(Laporan yang semestinya disusun/ jumlah kewenangan) x 100%**	**persen**	**50**	**55.000.000**	**0**	**10**	**20**	**20**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**% Dokumen penyediaan data informasi tahun n**	**persen**	**50**	**55.000.000**	**0**	**10**	**20**	**20**	**50**	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	Dokumen tahun n	dokumen	1	55.000.000	0	0	0	1	1	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (poin)	predikat	76,16		0,00	0,00	76,16	76,16	76,16	DPMPTSP
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**(Jumlah kegiatan dalam program yang dilaksanakan/ jumlah kegiatan sesuai kewenangan) x 100%**	**persen**	**100,00**	**5.949.254.177**	**25**	**50**	**75**	**100**	**100**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n**	**dokumen**	**3,00**	**5.763.000**	**1**	**2**	**3**	**3**	**3**	**Sekretaris**
2.18.01.2,01.05	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	Dokumen	3,00	2.917.000	**1**	**2**	**3**	**3**	**3**	Ketua Tim

	Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	perencanaan yang disusun pada tahun n									Kerja PEP
2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	dokumen laporan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	Laporan	1,00	2.846.000	1	1	1	1	1	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	**bulan**	**12,00**	**3.895.270.179**	**3**	**6**	**9**	**12**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n	orang /bulan	25,00	3.895.270.179	25	25	25	25	25	Ketua Tim Kerja Keuangan
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n**	**Laporan**	**2,00**	**64.528.000**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah pegawai yang mengikuti diklat tahun n	orang	4,00	19.528.000	0	2	4	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	jumlah orang yang mengikuti bimtek tahun n	orang	30,00	45.000.000	0	30	30	30	30	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**bulan**	**12,00**	**520.899.600**	**3**	**6**	**9**	**12**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan [Paket]	penyediaan paket komponen instalasi listrik tahun n	Paket	4,00	39.936.000	1	2	3	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Paket	8,00	194.608.600	2	4	6	8	8	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket logistik tahun n	Paket	4,00	70.415.000	1	2	3	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang	penyediaan paket barang cetakan dan	Paket	4,00	89.290.000	1	2	3	4	4	Kasubag Umum dan

	Penggandaan	Disediakan [Paket]	penggandaan tahun n									Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan [Dokumen]	penyediaan dokumen bahan bacaan tahun n	Dokumen	1,00	7.000.000	1	2	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Jumlah laporan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	Laporan	25,00	100.000.000	10	20	25	25	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen laporan penataausahaan arsip tahun n	Dokumen	1,00	19.650.000	1	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pengadaan barang tahun n**	**Laporan**	**2,00**	**96.947.000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	pengadaan kendaraan dinas tahun n	Paket	1,00	35.000.000	0	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	paket pengadaan mebel tahun n	Unit	4,00	26.742.000	2	4	4	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	Unit	28,00	35.205.000	5	5	15	28	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n**	**bulan**	**12,00**	**1.008.121.398**	**3**	**6**	**9**	**12**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	Laporan	4,00	6.000.000	1	2	3	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	Laporan	4,00	507.925.022	1	2	3	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Laporan	4,00	77.161.000	1	2	3	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pelayanan umum tahun n	Laporan	4,00	417.035.376	1	2	3	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**Laporan**	**2,00**	**357.725.000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**

			tahun n									
2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun n	Unit	15,00	230.520.000	6	12	15	15	15	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Mebel tahun n	Unit	96,00	13.582.000	5	25	50	75	96	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun n	Unit	1,00	18.260.000	0	1	1	1	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun n	Unit	1,00	49.765.000	0	0	1	1	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tahun n	Unit	28,00	45.598.000	28	28	28	28	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian

C. JADWAL MONITORING DAN EVALUASI

Secara rinci Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam pencapaian kinerja dengan mengacu pada indikator tujuan, sasaran OPD, program, kegiatan dan subkegiatan.

Adapun Rencana jadwal monitoring dan evaluasi sebagai berikut;

No.	Tri Wulan	Pelaksanaan	Tim Monev	Keterangan
1.	Tri Wulan I	Minggu I – II bulan April 2025	Kepala Dinas, Sekretaris, Tim Kerja PEP	
2.	Tri Wulan II	Minggu I – II bulan Juli 2025	Kepala Dinas, Sekretaris, Tim Kerja PEP	
3.	Tri Wulan III	Minggu I – II bulan September 2025	Kepala Dinas, Sekretaris, Tim Kerja PEP	
4.	Tri Wulan IV	Minggu I- II bulan Januari 2026	Kepala Dinas, Sekretaris, Tim Kerja PEP	Sekaligus Monev Tahun 2025

BAB III

P E N U T U P

Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Aksi disusun dengan mempedomani Renstra dan Renja perangkat daerah yang mengacu kepada RPJMD dan RKPD, yang diantaranya memuat kebijakan, program kegiatan dan subkegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025, sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Aksi ini secara umum menguraikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan serta indikator dan target kinerja. Dengan mempedomani Rencana Kerja Tahunan ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), diharapkan tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi misi Bupati.

Demikian dokumen Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode tahun 2025 ini yang disusun sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan.

Sragen, 20 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 052/ 136 /18/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dipandang perlu menetapkan rencana aksi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025
b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tentang Rencana Aksi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 66 Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana aksi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 20-01-2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001